

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis keserasian belanja maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menggunakan aktivitas belanjanya hanya difokuskan pada belanja tidak langsung.
2. Dari hasil perhitungan efisiensi belanja maka dapat dilihat mulai tahun anggaran 2013-2016 pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sudah melakukan penghematan anggaran namun harus ditingkatkan lagi. Pada Tahun anggaran 2013 pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penghematan sebesar 17,2%, tahun anggaran 2014 sebesar 18,03%, tahun anggaran 2015 17,79% dan pada tahun 2016 17,67%.
3. Dari analisis pertumbuhan belanja Tahun anggaran 2012/2013, tahun anggaran 2013/2014, tahun anggaran 2014/2015, dan tahun anggaran 2015/2016 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Pada tahun 2013 adalah pertumbuhan sebesar 0,11%, tahun 2014 adalah pertumbuhan sebesar 17,81%, tahun 2015 pertumbuhan sebesar 23,23% dan pada tahun 2016 pertumbuhan sebesar 16,26% .

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi badan keuangan dan asset daerah agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Agar asas adil dan manfaat bagi masyarakat dapat lebih dirasakan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara lebih memperhatikan keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. belanja yang lebih menyentuh kepada masyarakat dan infastruktur yang menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti tentang anggaran belanja daerah secara lebih rinci sehingga akan selalu ada perubahan kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Anggaran, 2009. *Anggaran Berbasis Kinerja*, Web: <http://www.anggaran.depkeu.go.id>.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. STIM YKPN:Yogyakarta. Edisi Ketiga
- Halim, Abdul. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 Tentang *pedoman Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Pulik*, Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit penerbit dan percetakan STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2009, *manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Web: <http://www.bpkp.go.id>.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian manajemen*, CV Alvabeta, Bandung
- Suryaningrum. 2003. *Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, Hal. 1529.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Web: <http://www.dmo.or.id>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah